



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **VERRY JUNANTA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **455738**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.515.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 46 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 1132 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 1096 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 739 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 516 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 8.000.000**

1. MOTOR, HONDA NC12AF2CB1 A/T VARIO TECHNO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 27.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 4.252.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.554.252.000**



III. HUTANG

Rp. 380.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.174.252.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.